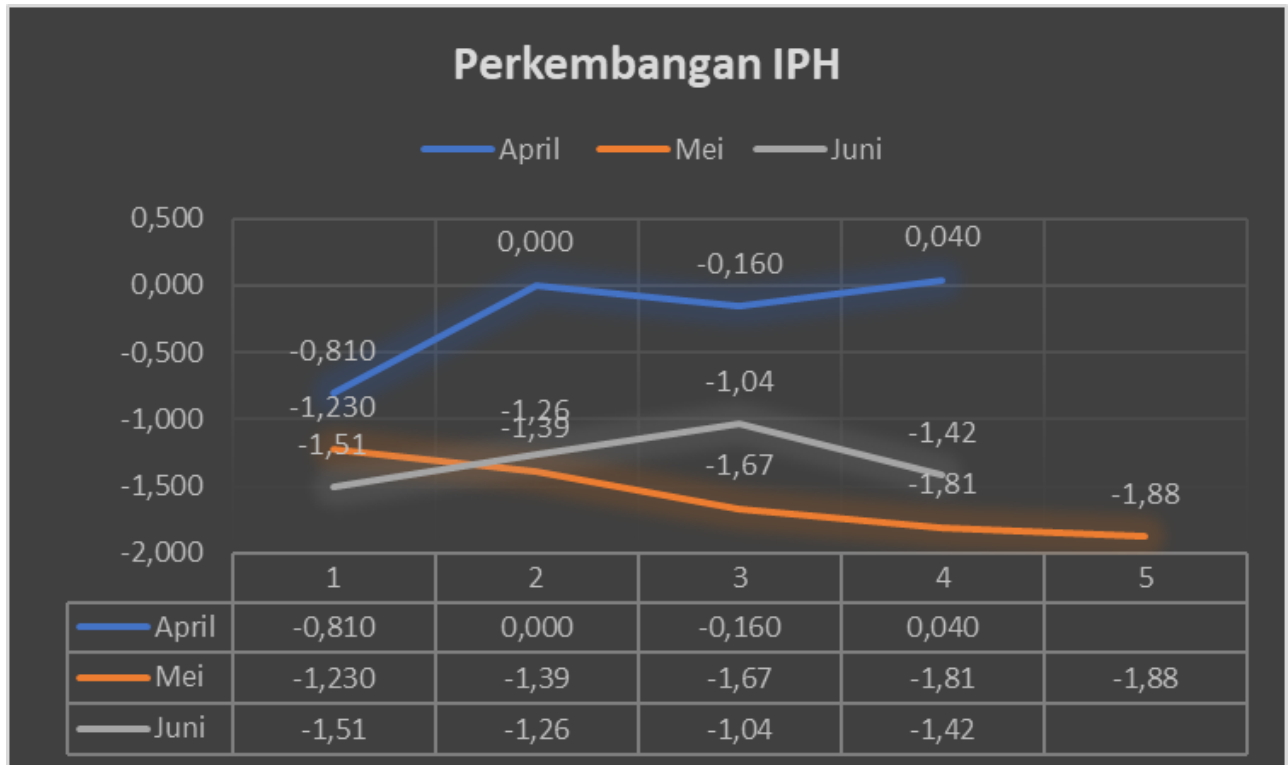


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Pesisir Barat pada Triwulan II tahun 2024 relatif turun. Berdasarkan data IPH menunjukkan penurunan harga hingga -1,51% pada Minggu Pertama Juni 2024 dengan komoditas andil bawang merah, jeruk dan beras.



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan atau kendala dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat adalah keterbatasan APBD dalam melaksanakan upaya konkrit pengendalian inflasi, yaitu Operasi Pasar Murah, bantuan transportasi dan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Harga komoditas pangan, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, dan lainnya lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung karena berasal dari daerah lain yang membutuhkan biaya transportasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. TPID Kabupaten Pesisir Barat secara rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok dan penting di 6 Pasar Tradisional dan melaporkan setiap hari kepada Itjen Kemendagri;
2. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah setiap minggunya, kemudian dilanjutkan dengan Rapat TPID untuk membahas persoalan yang ada dan mengambil langkah kebijakan pengendalian inflasi;
3. Mempublikasi data harga bahan pokok setiap minggu di Website Resmi Kabupaten Pesisir Barat agar dapat diketahui masyarakat dan mencegah panicbuying (belanja

berlebihan).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Pesisir Barat perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Bulog dan stakeholder lainnya dalam rangka mengintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar dan upaya pengendalian inflasi lainnya. Inovasi dalam pengendalian inflasi juga menjadi tantangan bagi TPID di masa mendatang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. TPID Kabupaten Pesisir Barat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Bulog dan pihak lainnya untuk lebih intens dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat;
2. Bantuan bibit tanaman, bantuan cetak sawah dan irigasi sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produksi dalam daerah;
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan Program pengembangan dan penelitian tanaman pangan yang selama ini tidak diminati oleh petani, sehingga mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.